

**ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
PADA PETERNAK SAPI PERAH
(Survey di Wilayah Kerja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung)**

Oleh:
Achmad Firman dan Linda Herlina
Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran
Jatinangor, Bandung 40600

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pada peternak sapi perah di wilayah kerja KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung. Objek dari penelitian ini adalah peternak sapi perah yang menjadi anggota koperasi. Jumlah responden yang dipilih untuk dijadikan sampel sebanyak 69 orang yang dilakukan secara proporsional. Hasil analisis pada tingkat kemiskinan dilakukan berdasarkan dua standar kemiskinan, yaitu berdasarkan Biro Pusat Statistik dan Bank Dunia. Adapun kondisi kemiskinan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu miskin *persistent* dan miskin *transient/vulnerable*. Tingkat kemiskinan yang terjadi pada peternak sapi perah di wilayah KUD tersebut menunjukkan jumlah peternak miskin yang dikategorikan miskin *persistent* sebanyak 14 orang (20,29 persen) berdasarkan standar BPS atau 24 orang (34,78 persen) berdasarkan standar Bank Dunia. Sedangkan responden yang dikategorikan sebagai miskin *vulnerable* sebanyak 32 orang (46,38 persen) berdasarkan standar BPS atau 22 orang (31,88 persen) berdasarkan standar Bank Dunia. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa yang tidak termasuk kategori miskin berjumlah 23 orang (baik berdasarkan standar BPS ataupun Bank Dunia). Bila ditinjau dari tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dari peternak sapi perah di wilayah tersebut menunjukkan nilai Gini Rationya sebesar 0,2149. Ini berarti bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di tingkat peternak sapi perah relatif rendah. Rendahnya tingkat ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa antara peternak kaya dan miskin tidak terjadi gap yang lebar. Hal ini menandakan bahwa jumlah kepemilikan ternak tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat ketimpangan namun produktivitas dan kualitas susu-lah yang berpengaruh terhadap pendapatan peternak.

Kata kunci: Tingkat Ketimpangan, Distribusi Pendapatan, Tingkat Kemiskinan

**THE ANALYSIS OF PERSISTENT AND VULNERABLE POVERTY AND INCOME
DISTRIBUTION GAP AT DAIRY FARMERS
(Survey at Sinar Jaya Countryside Unit Co-operation Area in Kabupaten Bandung)**

By
Achmad Firman and Linda Herlina

Abstract

This research aim to evaluate the poverty level and income distribution gap at dairy farmers in Sinar Jaya Co-operation (KUD Sinar Jaya) Area - Bandung District. The Object of research is dairy farmer who was member of KUD Sinar Jaya. Amount of respondents was selected are 69 farmers who conducted by proportional sampling. The result research at poverty level use BPS and World Bank poverty standard. We found two poor condition at dairy farmers in KUD Sinar Jaya, that are persistent condition and

vulnerable condition. The number of persistent condition are 14 persons (20.29 percent) with BPS standard or 24 persons (34.78 percent) with World Bank standard. Besides, we found the number of vulnerable condition are 32 persons (46.38 percent) with BPS standard or 22 persons (31.88 percent) with World Bank standard. Based on research that we found only 23 persons which was not poor condition. This result showed that Gini Ratio value at dairy farmers in KUD Sinar Jaya area is 0.2149. It means that there is no gap condition between poor and rich farmers. It signed that the sum of dairy cattle do not influence to income distribution gap but productivity and quality of milk is very important to increase earning of farmers.

Key words: Gap level, Income Distribution, Poverty Level

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usahaternak sapi perah merupakan kegiatan agribisnis yang telah lama digeluti oleh peternak di Indonesia. Kebanyakan kegiatan usahaternak sapi perah tersebut didominasi oleh usaha peternakan rakyat dengan skala kepemilikan ternak antara 1 – 6 ekor sapi perah. Awalnya kegiatan usahaternak sapi perah adalah sebagai usaha sampingan yang dilakukan oleh peternak, akan tetapi lambat laun kegiatan ini menjadi sumber penghasilan utama bagi peternak karena memberikan nilai tambah pendapatan bagi peternak.

Pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan impor besar-besaran sapi perah unggul dari New Zealand dan Australia untuk meningkatkan jumlah populasi ternak sapi perah di Indonesia. Introduksi ini memicu perkembangan peternakan sapi perah dan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk yang terus meningkat, maka permintaan akan susu pun semakin meningkat pula. Hal ini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah peternak sapi perah, koperasi persusuan, dan industri pengolahan susu.

Namun, sejak tahun 1988 – 2003, perkembangan populasi ternak sapi perah khususnya di Jawa Barat tidak mengalami perkembangan yang berarti alias stagnan. Kemungkinan kondisi ini dipicu oleh semakin sempitnya lahan untuk peternakan sapi perah dan sulitnya mencari hijauan sebagai makanan pokok ternak sapi perah. Sehingga para peternak tidak dapat meningkatkan jumlah populasinya karena keterbatasan tersebut.

Bila dilihat dari kondisi tersebut, maka apakah pendapatan yang selama ini diperoleh masih mencukupi untuk kebutuhan hidup peternak. Kondisi inilah menjadi salah satu faktor untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada peternak sapi perah.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi konsentrasi pada penelitian ini adalah seberapa besar tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada peternak sapi perah di wilayah kerja KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada peternak sapi perah di wilayah kerja KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai komponen yang dapat menggambarkan apakah masyarakat tersebut sudah berada pada kehidupan yang sejahtera atau belum. Komponen yang dapat dilihat antara lain keadaan perumahan di mana mereka tinggal, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Biro Pusat Statistik (2000) menyatakan bahwa komponen kesejahteraan yang dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat adalah kependudukan, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi masyarakat, keadaan perumahan dan lingkungan, dan keadaan sosial budaya.

Di samping komponen yang dikemukakan di atas, ada komponen lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat misalnya luas kepemilikan lahan (Djohar, 1999). Hal ini dimungkinkan karena dilihat dari segi ekonomi, lahan/tanah merupakan *earning asset* yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan dilihat dari segi sosial, lahan/tanah dapat menentukan status sosial seseorang terutama di daerah pedesaan. Sedangkan pada peternak sapi perah, yang dijadikan sebagai *earning asset* adalah sapi perahnya karena sapi perah dapat menghasilkan pendapatan dari hasil susu yang diperah dan sekaligus dijadikan penyangga peternak bila kekurangan modal dengan menjual ternaknya. Oleh karena itu, antara struktur pendapatan dengan jumlah kepemilikan sapi perah terdapat kaitan yang erat.

Bila kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakmerataan terutama dalam tingkat pendapatan sebab kondisi di atas dapat dipenuhi jika pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Atkinson (1976) yang dikutip oleh Rusli, *et.al* (1996) mendefinisikan bahwa ketidakmerataan pendapatan sebagai perbedaan, persebaran, atau pemusatan pendapatan, yang keseluruhannya berpangkal pada ketidaksamaan dilihat secara kumulatif.

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin besar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan.

Kemiskinan

Banyak definisi tentang kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan telah didefinisikan berbeda-beda dan merefleksikan suatu spektrum orientasi ideologi. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Jennings, 1994; Pandji-Indra, 2001). Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Parwoto, 2001). Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau asasi manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang (Fernandez, 2000).

Lebih jauh lagi, kemiskinan dipandang tidak hanya menyangkut standar pendapatan atau konsumsi yang rendah melainkan juga rendahnya kebebasan berpolitik dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal tersebut berkaitan pula dengan keterbatasan fasilitas umum, pilihan, kesempatan serta partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi (Sen, 1999; Pandji-Indra, 2001).

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok

orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pandji-Indra, 2001).

Ditinjau dari kelompok sasaran terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu 1) Kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya), 2) Kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas), dan 3) Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, *kemiskinan ekstrim (extreme poverty) atau kemiskinan absolut* adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, *kemiskinan secara umum (overall poverty), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif*, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Penggolongan tipe kemiskinan lainnya adalah *kemiskinan persisten*, yaitu situasi di mana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Di Amerika, yang dimaksud dengan kelompok miskin persisten adalah mereka yang telah menerima tunjangan kesejahteraan selama lebih dari 8 tahun (Berrick, 1995; Pandji-Indra, 2001). Sedangkan *kemiskinan transien* adalah situasi di mana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan (Pandji-Indra, 2001). Kondisi kemiskinan transien ini dapat ditemui pada saat suatu negara dilanda krisis ekonomi atau bencana alam. Tinjauan lain mengenai kemiskinan adalah garis kemiskinan (*poverty line*) dan ukuran kemiskinan (*poverty measurement*), yang merupakan indikator kuantitatif untuk menentukan individu atau kelompok masyarakat miskin. Garis kemiskinan biasanya dihubungkan dengan standar hidup, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (barang dan jasa). Namun konsep ini masih terus diperdebatkan, khususnya dalam menentukan keluarga atau masyarakat yang perlu ditolong melalui program penanggulangan kemiskinan. Selama ini data kemiskinan yang dipakai di Indonesia adalah yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kebutuhan dasar atau konsumsi keluarga untuk kemiskinan dan dikonversikan ke dalam rupiah. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonversikan ukuran kemiskinan ke dalam 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kekurangan pakaian, rumah tinggal, kesehatan, pendidikan, bahan bakar dan keperluan transportasi.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklasifikasikan kemiskinan menjadi 5 (lima) ukuran, yaitu prasejahtera (dibagi dua alasan ekonomi dan bukan ekonomi), sejahtera I (dibagi dua alasan ekonomi dan bukan ekonomi), sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera III+. Keluarga miskin (Gakin) menurut BKKBN adalah prasejahtera dengan alasan ekonomi, dan sejahtera I dengan alasan ekonomi. Perbedaan versi ini menyebabkan perbedaan jumlah penduduk miskin yang dari

masing-masing kriteria tersebut. Sebagai contoh jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 menurut BPS adalah sebanyak 47,97 juta jiwa, BKKBN melaporkan sebanyak 52,29 juta jiwa (praKS dan KS 1 dengan alasan ekonomi), dan SMERU melaporkan 55,80 juta jiwa.

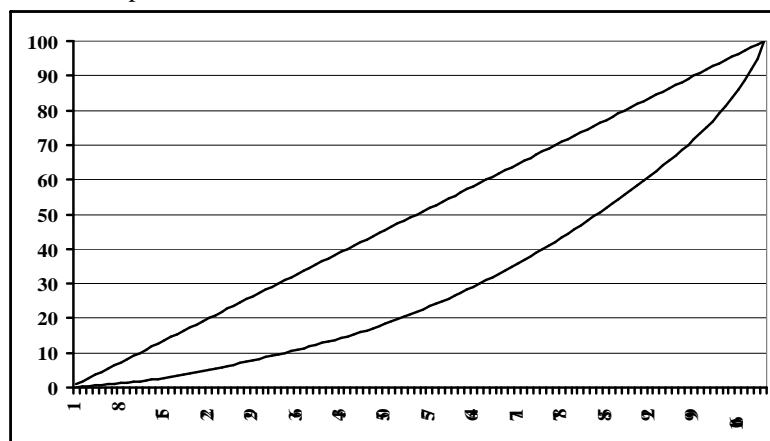
Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan melalui ukuran dollar, yaitu US\$ 1 per orang perhari (berdasarkan *power purchase parity* tahun 1993). Karenanya, bila suatu individu hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari satu dollar per hari dapat dikatakan sebagai di bawah garis kemiskinan.

Bank Dunia melontarkan pemikiran pengukuran kemiskinan melalui metoda Penilaian Kemiskinan secara Partisipatif (*Participatory Poverty Assessment/PPA*) oleh komunitas miskin itu sendiri untuk menentukan dimensi-dimensi kemiskinan pada komunitas tersebut. *Participatory Poverty Assessment* digunakan untuk memahami kemiskinan dari sudut pandang kaum miskin dengan memfokuskan pada realita, kebutuhan, dan prioritasnya. *Participatory Poverty Assessment* mengidentifikasi bahwa kemiskinan juga ditekankan pada aspek-aspek lain seperti kerentanan, keterisolasian secara fisik dan sosial, kurangnya rasa aman dan harga diri, dan ketidakberdayaan (Robb, 1999; Pandji-Indra, 2001).

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi (Ismoro, 1995 yang dikutip oleh Rahayu, dkk., 2000). Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Pengukuran masalah pemerataan telah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmunan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *Gini coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Lorentz curve* (Gambar 1). Sedangkan untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan metode *headcount measure* dan *poverty gap*. Ukuran yang dipakai dalam menentukan ketidakmerataan baik di tingkat wilayah maupun rumah tangga adalah *gini coefficient* dan tingkat kemiskinan.

% Kumulatif Pendapatan



% Kumulatif Populasi

Gambar 1. Kurva Lorentz dan Garis Pemerataan Pendapatan

Gini coefficient merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variabel-variabel lain yang terkait dengan distribusi di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik (Bappenas, 2002). Menurut Cobwell (1977) yang dikutip oleh Mitchell (1991)

menyatakan bahwa pengukuran ketidakmerataan dapat menggunakan *gini coefficient*. Selain itu, tingkat ketimpangan dapat diukur juga melalui *personal income* dengan menggunakan Kurva Lorenz, yaitu yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase populasi penerima pendapatan dengan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu, seperti terlihat pada Gambar 1 (Santosa dan Prayitno, 1996 yang dikutip oleh Rahayu, dkk., 2000). Pada gambar tersebut, sumbu horisontal mewakili jumlah populasi penerima pendapatan dan sumbu vertikal menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk (Todaro, 1981). Garis Kurva Lorenz akan berada di atas garis horisontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara sampling proporsional terhadap 69 responden yang merupakan anggota koperasi dari KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dengan menggunakan *headcount inde*. Di mana : K = tingkat kemiskinan; q = jumlah penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan; dan n = adalah jumlah penduduk.

$$K = q/n \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Penentuan garis kemiskinan menggunakan standar tingkat kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia pada suatu daerah. Oleh karena itu dapat dikategorikan:

- a. Jika responden peternak berada di atas garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai peternak yang kaya atau mapan
- b. Jika responden peternak berada disekitar garis kemiskinan, maka dapat dikategorikan peternak berada dalam kerentanan (*vulnerable/transien*), yaitu jika ada kejadian yang luar biasa atau pendapatan dari usaha peternakan sapi perah berkurang akan jatuh miskin
- c. Jika responden peternak berada di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai kemiskinan persisten

Adapun formula yang dipakai untuk menghitung tingkat ketimpangan yang terjadi pada peternak sapi perah sebagai berikut:

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_{i+1} + Y_i) \dots\dots\dots (2)$$

Di mana GC = *Gini Coefficient*; Xi = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i; dan Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i. Nilai gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila nilai gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sedangkan semakin kecil atau mendekati nol suatu nilai gini maka semakin meratanya distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Menurut Todaro (1981) angka GC untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan bahwa distribusi pendapatan sangat timpang jika angka gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif sama ketimpangannya jika angka gininya antara 0,2 sampai 0,35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Penelitian

Luas wilayah Kecamatan Cilengkrang adalah sebesar 3.175,87 ha. Jumlah desa yang berada di wilayah ini ada sebanyak enam desa yang terdiri dari, Desa Cipanjal, Desa, Girimekar, Desa Jatiendah, Desa Melatiwangi, Desa Cipreat, dan Desa Cilengkrang. Ketinggian wilayah rata-rata adalah 780 meter dari permukaan laut dengan suhu udara berkisar antara 14 °C – 30°C dan kelembaban udara 80,30 persen serta curah hujan sekitar 2.315 mm/tahun (Monografi Kecamatan Cilengkrang, 2002). Dilihat dari sisi tataguna lahan, penggunaan lahan yang terbesar digunakan untuk hutan (33,60 persen) disusul untuk perkebunan (32,35 persen), pertanian lahan kering (27,02 persen), sawah (6,39 persen), dan fasilitas umum (0,36 persen). Potensi penggunaan lahan tersebut memberikan dukungan bagi penyediaan rumput bagi peternakan sapi perah.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah keluarga miskin yang berada di Kecamatan Cilengkrang mencapai 44 persen. Desa yang terbesar jumlah keluarganya adalah Desa Cipanjal (79 persen) dan Desa Cilengkrang (63 persen). Adapun penggolongan penduduk berdasarkan mata pencaharian, jumlah yang bekerja sebagai petani mencapai 40,85 persen, peternak 15,48 persen dan pedagang 15,36 persen. Dilihat dari tingkat pendidikannya, rata-rata penduduk Kecamatan Cilengkrang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini diperlihatkan dari jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah mencapai 21,40 persen, tamatan SD/Sederajat sebanyak 49,88 persen, tamatan SLTP/Sederajat sebanyak 17,50 persen, tamatan SMU/Sederajat sebanyak 6,46 persen, dan yang tamat dari akademi dan perguruan tinggi hanya mencapai 4,76 persen (Monografi Kecamatan Cilengkrang, 2002). Kondisi ini dapat mempengaruhi sikap penduduk dalam meningkatkan inovasi dan mengakses informasi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

No	Nama Desa	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Keluarga Miskin	%
1.	Cipreat	971	3300	327	34
2.	Melatiwangi	618	2730	219	35
3.	Girimekar	1330	6257	608	46
4.	Jatiendah	2307	10725	707	31
5.	Cilengkrang	626	2377	395	63
6.	Cipanjal	1008	3954	793	79
	Jumlah	6.860	29.343	3.049	44

Sumber: Biro Pusat Statistik, Tahun 2000

Identitas Responden

Identitas responden sapi perah di Kecamatan Cilengkrang berdasarkan hasil sampling proporsional terhadap beberapa peternak menggambarkan rata-rata umur responden berada pada usia produktif (89,85 persen). Tingkat pendidikan dari responden relatif rendah, yaitu 84,06 persen hanya tamatan sekolah dasar. Kondisi ini bisa mempengaruhi sikap para peternak terhadap adopsi teknologi dan informasi yang diberikan, baik oleh petugas KUD, penyuluh, dan sebagainya. Pengalaman beternak sapi perah sudah relatif lama, yaitu lebih dari lima tahun (88,41 persen). Hal ini menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi perah telah menjadi usaha pokok bagi sebagian besar peternak. Adapun jumlah kepemilikan ternak berada diantara 3-4 ekor per peternak (46,38 persen) dan di atas lima ekor (36,23 persen). Ini membuktikan

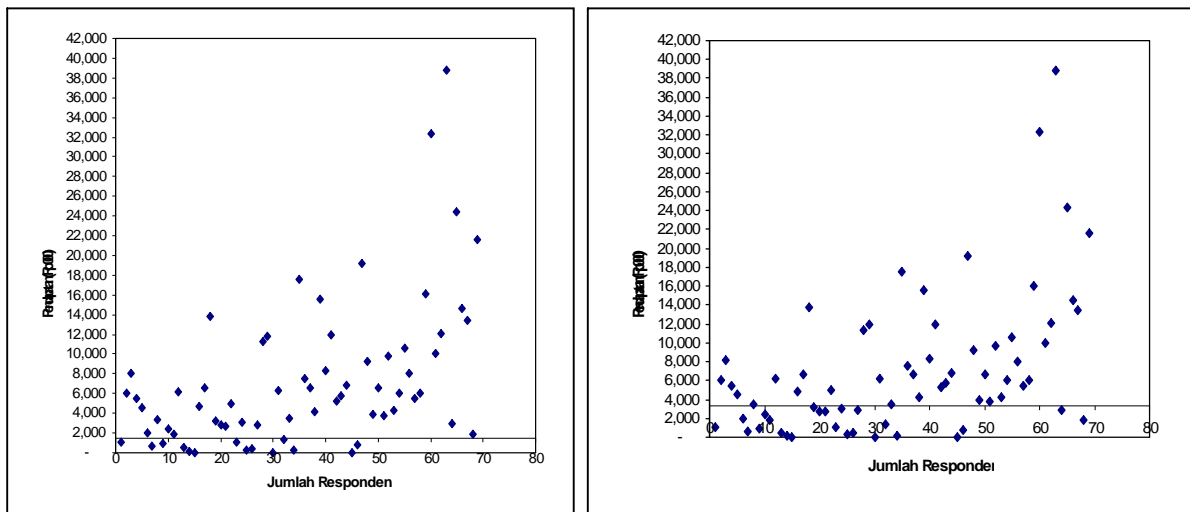
bahwa dengan jumlah kepemilikan tersebut, para peternak akan mampu menghidupi keluarganya.

Kondisi Kemiskinan

Hasil analisis terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan terdapat dua kategori kemiskinan, yaitu kategori kemiskinan rentan/*vulnerable/transient* (berada pada disekitar garis kemiskinan) dan miskin *absolute/persistent* (berada di bawah garis kemiskinan). Perhitungan garis kemiskinan pada penelitian ini menggunakan dua standar garis kemiskinan, yaitu berdasarkan BPS dan Bank Dunia. Standar garis kemiskinan BPS untuk Propinsi Jawa Barat dengan memperhitungkan tingkat inflasi 10 persen pertahun adalah sebesar Rp 1.533.389/kapita/tahun, sedangkan standar garis kemiskinan yang dikeluarkan Bank Dunia adalah sebesar Rp 3.285.000/kapita/tahun (standar US\$ 1 /kapita/hari). Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Kisaran pendapatan peternak sapi perah dari hasil produksi susunya selama satu tahun adalah sebesar Rp Rp 28 ribu – 38,8 juta. Kisaran pendapatan ini cukup besar sekali. Hal ini tergantung dari produktivitas ternak dan jumlah kepemilikan ternak sapi perah yang dimiliki oleh peternak. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa usaha ternak sapi perah merupakan pekerjaan pokok dari peternak sehingga seluruh kebutuhan hidup diperoleh dari hasil usaha ternak.

Gambar. 1. Kondisi Kemiskinan Berdasarkan Kriteria BPS dan Bank Dunia



A. Berdasarkan BPS

B. Berdasarkan Bank Dunia

Hasil analisis menunjukkan bahwa peternak yang hidup di bawah garis kemiskinan (miskin *absolute/persistent*) sebanyak 20,29 persen (14 orang) berdasarkan standar kemiskinan BPS atau sebanyak 34,78 persen (24 orang) berdasarkan standar kemiskinan Bank Dunia (Tabel 2). Adapun peternak yang berada pada kondisi rentan (*vulnerable*) pada kedua standar tersebut masing-masing sebesar 32 orang untuk standar BPS dan 22 orang untuk standar Bank Dunia. Hal ini menunjukkan bila hasil produksi susu yang dihasilkan ternak berkurang maka akan berdampak pada pengurangan pendapatan bagi peternak. Di samping itu, bila pembayaran hasil penjualan susu peternak koperasi tidak sesuai dengan harga perkualitas dan waktu pembayarannya akan berdampak pada kerentanan terhadap kemiskinan karena kebanyakan peternak mengandalkan koperasi.

Berdasarkan hasil analisis kemiskinan dengan menggunakan dua standar kemiskinan tersebut, tampak jelas bahwa jumlah orang miskin yang terjaring oleh

standar kemiskinan Bank Dunia lebih banyak dibandingkan dengan BPS. Mengingat kondisi global yang sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, maka standar Bank Dunia lebih akurat untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Responden yang Berada pada Kondisi Kemiskinan

No.	Kriteria Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/tahun)	Tidak Miskin (orang)	Jumlah Orang Termasuk	
				Miskin Persistent	Miskin Vulnerable
1.	Biro Pusat Statistik	1.533.389	23	14	32
2.	Bank Dunia	3.285.000	23	24	22
Standar Deviasi		7.404.425			

Keterangan: Standar Deviasi digunakan untuk menghitung kondisi rentan

Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan dari distribusi pendapatan dari suatu populasi penduduk. Distribusi pendapatan pada responden peternak di wilayah kerja KUD Sinar Jaya dikelompokkan ke dalam tiga strata peternak berdasarkan jumlah ternak sapi perah yang dimiliki oleh responden tersebut. Adapun ketiga strata tersebut adalah Strata I peternak dengan kepemilikan ternak kurang dari 5 ekor, Strata II dengan kepemilikan ternak antara 5 – 6 ekor, dan Strata III dengan kepemilikan ternak lebih dari 6 ekor. Pembagian strata ini digunakan untuk mempermudah perhitungan distribusi pendapatan dari peternak berdasarkan skala usaha kepemilikan ternak sapi perah.

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Strata	Kumulatif Pendapatan	Persentase Pendapatan	Persentase Peternak per Strata
I	37,517,456	7,57	17,39
II	74,707,630	15,07	26,09
III	383,480,125	77,36	56,52
Gini Koefisien		0,2149	

Adapun capaian distribusi pendapatan pada peternak di wilayah kerja KUD Sinar Jaya seperti terlihat pada Tabel 3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa peternak pada Strata I hanya sebesar 17,39 persen dari total responden, sedangkan responden terbanyak berada pada strata III. Hal ini menunjukkan peternak sudah menganggap usaha peternakan sapi perah menjadi usaha pokok mereka yang dibuktikan dengan jumlah kepemilikan ternak sapi perah yang cukup banyak. Selanjutnya pada Tabel 4 diperlihatkan pula bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi pada peternak sapi perah dapat dikategorikan rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien gininya kurang dari 0.5. Todaro (1981) menyatakan bahwa distribusi pendapatan di negara-negara berkembang dikatakan sangat timpang jika angka Gini lebih dari 0,5 dan ketimpangan relatif rendah bila berada pada kisaran 0,2 sampai 0,35. Rendahnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada peternak sapi perah di KUD Sinar Jaya sama halnya dengan para peternak di KUD Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang dilaporkan oleh Rahayu, dkk (2000). Rendahnya tingkat ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa antara peternak kaya dan miskin tidak terjadi gap yang lebar

karena nilai pendapatan peternak diperoleh berdasarkan jumlah dan kualitas dari produksi susu yang dihasilkan ternak sapi perahnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang mengungkapkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dari peternak di wilayah studi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi kemiskinan pada peternak sapi perah berada pada kisaran 20,29 persen dan 34,78 persen berdasarkan kriteria BPS dan Bank Dunia.
2. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur berdasarkan nilai Gini Coefficient bernilai rendah (0,2149). Artinya ketimpangan antara peternak yang kaya dan miskin tidak terjadi ketimpangan yang cukup besar.

Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya standar kemiskinan yang selama ini digunakan oleh BPS harus mengakomodasi dampak global terhadap perekonomian Indonesia, misalnya pengaruh harga nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
2. Sebaiknya, bila belum terdapat standar yang dapat mengakomodasi pengaruh global terhadap kemiskinan, maka standar kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dapat dijadikan rujukan untuk melihat tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Salah satu cara untuk mengeliminir tingkat ketimpangan antar peternak, sebaiknya kepemilikan ternak sapi perah laktasi ditambah minimal 5 ekor sapi laktasi sehingga dengan jumlah tersebut peternak berada di atas garis kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadilaga, D., Soeharsono, A. Soedono, J.S. Danoatmadja, T. Usri, S. Atmamihardja, M. P. Rukmana, U.D. Rusli. 1976. Mari Beternak Sapi Perah. Fakultas Peternakan. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2002. Studi Analisis Kemiskinan Tahun 2001 (*Draft*). Bappenas, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. 2000. Indikator Sosial Ekonomi Indonesia. Biro Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Djohar, I. 1999. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kotamadya Batam dengan Pendekatan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Haeruman, Herman J.S. 1997. Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: kearah integrasi perekonomian kota-desa. Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Perdesaan Indonesia. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mitchell, Deborah. 1991. *Income Transfers in Ten Welfare States*. Avebury. Sidney.
- Panji Indra. 2001. *An Analysis Towards Urban Poverty Alleviation Program in Indonesia*. Philosophy Doctor Dissertation. Faculty of the School Policy, Planning, and Development. University of Southern California, California.
- Parwoto. 2001. Makalah Penanggulangan Kemiskinan (*Unpublished*). Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana Wilayah, Jakarta.

- Rahayu, S., Sondi, K., dan Adang, R. 2000. Analisa Pemerataan Pendapatan Usahaternak Sapi Perah Rakyat (Survey Pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di KUD Mitra Yasa Kabupaten Tasikmalaya). Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Sumedang.
- Rusli, S., H. Siregar, dan Y. Saukat. 1996. Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan Kasus Profil Propinsi Riau. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Todaro, M.P. 1981. *Economic Development in The Third World*. 2nd edition. Long Man Inc. New York
- Suparlan, Parsudi. 2000. Kemiskinan Perkotaan dan Alternatif Penanganannya. Ditunjukkan dalam Seminar Forum Perkotaan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. JPS dan Pemberdayaan. Gramedia. Jakarta
- UNDP. 2000. *Overcoming Human Poverty*. United Nations Development Programme. Poverty Report 2000